

## **ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA SDN 1 BEBALANG BANGLI TAHUN 2015**

Siti Rodliyah Novita<sup>1</sup>, I Wayan Swendra<sup>2</sup>,  
Ni Nyoman Yuliantini<sup>3</sup>

Jurusan Manajemen  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Singaraja, Indonesia

E-mail : [vittwinangel@gmail.com](mailto:vittwinangel@gmail.com), [Yc9eda@yahoo.co.id](mailto:Yc9eda@yahoo.co.id),  
[yulianthini\\_nyoman@yahoo.com](mailto:yulianthini_nyoman@yahoo.com)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana BOS yang diterima oleh SD Negeri 1 Bebalang Bangli, (2) siapakah pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana BOS tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menggambarkan atau menguraikan suatu situasi yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap, antara lain: (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) menarik simpulan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: (1) akuntabilitas untuk pengelolaan dana BOS di SD Negeri 1 Bebalang Bangli berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan SD Negeri 1 Bebalang Bangli dalam mengelola dana dan membuat laporan pertanggungjawaban dilakukan dengan terbuka dan melibatkan banyak pihak, serta sudah sesuai dengan Juknis dana BOS tahun 2015. (2) Proses pengelolaan keuangan yang bersumber dari dana BOS pada SD Negeri 1 Bebalang Bangli melibatkan Kepala Sekolah, Bendahara, guru, pegawai administrasi sekolah, pengawas dan Komite Sekolah.

**Kata Kunci :** Akuntabilitas, Dana BOS, Sekolah Dasar

### **ABSTRACT**

*This research was aimed to find out (1) How accountability the funds BOS received was managed by SD Negeri 1 Bebalang Bangli, (2) The participants who involved in the fund BOS management. Type of this research is descriptive research with qualitative method which explain or analyze a factual situation systematically and accurately. The data analysis was conducted in three steps, such as: (1) data reduction, (2) data display, and (3) conclusion. The result of research shows that (1) accountability for the fund BOS management of SD Negeri 1 Bebalang Bangli work well, this matter because of SD Negeri 1 Bebalang Bangli in managing fund and make responsibility reporting openly and involve a lot of people and also have as according to Juknis of fund BOS year 2015 (2) process management of finance from fund BOS at SD Negeri 1 Bebalang Bangli involve fund BOS headmaster, preasurer, teacher, school staff, supervisor, and school committee.*

**Keywords:** *Accountability, Fund BOS, Elementary School*

## Pendahuluan

Era globalisasi yang serba sulit menuntut kita untuk memiliki pendidikan, kemampuan, dan pengetahuan sebagai modal untuk hidup. Suatu negara dapat dikatakan maju atau mundur dilihat dari tingkat pendidikan, karena dengan pendidikan suatu negara dapat mencetak sumber daya manusia yang berkualitas baik dan pendidikan merupakan proses mencetak generasi bangsa.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara tegas dinyatakan bahwa salah satu tujuan membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 6 Ayat (1) menyebutkan bahwa "setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar". Saat ini di negara kita masih banyak masyarakat yang belum menyadari betapa pentingnya pendidikan. Hal ini dapat kita lihat dari masih banyak anak-anak yang putus sekolah ataupun tidak bersekolah. Padahal untuk biaya pendidikan saat ini dijamin oleh pemerintah, sehingga masyarakat Indonesia dapat bersekolah tanpa dipungut biaya.

Sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap pendidikan, pemerintah menyelenggarakan pendidikan dasar tanpa dipungut biaya dengan mengadakan program bantuan yang bernama Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Menurut Peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 2009, standar biaya operasi nonpersonalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan. BOS merupakan program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan

pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

Sekolah merupakan pihak yang paling penting dalam penentuan penggunaan dana BOS, hal ini dikarenakan sekolah merupakan pihak yang menerima dana dan terkait secara langsung terhadap pengelolaan dana BOS tersebut. Sekolah diperbolehkan menggunakan dana BOS untuk beberapa jenis pengeluaran yang telah ditentukan oleh pemerintah dan berdasarkan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) yang disusun oleh sekolah dan Komite Sekolah.

Dana BOS merupakan salah satu instrumen dari APBN, maka dari itu sudah sewajarnya dikelola dengan baik, taat pada peraturan perundang-undangan, transparan dan bertanggung jawab. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dari diterimanya dana BOS maka pihak penerima dana BOS membuat sebuah laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS yang telah diterima. Laporan pertanggungjawaban tersebut harus dibuat dan diungkapkan secara tepat. Sehingga dapat memberikan pemahaman dan informasi bagi pemakai laporan tersebut.

Penyelewengan-penyelewengan yang terjadi terhadap dana BOS, kita ambil contoh kasus yang dilaporkan oleh Inspektorat Kendal dimana ada beberapa Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang menganggarkan sebagian BOS untuk keperluan diluar kegiatan belajar mengajar. Selain itu, pengeluaran keuangan yang berasal dari dana BOS belum dipungut dan disetor ke kas negara. Misalnya di SD Negeri 1 Gondang, SD Negeri 1 Gonoharjo untuk keperluan konsumsi. Sementara SD Negeri 1 Kedungboto dan SD Negeri 1 Peron untuk pengeluaran koreksi ujian. Di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Pageruyung, seperti di SDN 1 Gebangan, BOS digunakan untuk pembelian lemari sebesar Rp 1,5 juta, pembelian kaos untuk siswa miskin Rp 1,3 juta, pembelian cat Rp 1,9 juta dan pembelian administrasi pembelajaran guru RPP sebesar Rp 1,8 juta. Di SDN Getas

Blawong BOS dipakai untuk pembelian perangkat pembelajaran sebesar Rp 1,26 juta. Namun di kedua SD tersebut, baik SDN 1 Gebangan dan SDN Getas Blawong, semua dana tersebut laporannya tidak jelas dan belum ada Pajak Pendapatan Negara (PPN) yang disetorkan ke Kas Negara.

Menurut Jayatri (2012), dari penyimpangan dan penyelewengan yang terjadi tidak semuanya disebabkan oleh faktor kesengajaan. Ada juga yang disebabkan karena faktor kesalahan pemahaman terhadap petunjuk penggunaan dana BOS. Kurang spesifiknya petunjuk yang ada dalam panduan pengelolaan BOS menimbulkan penerjemahan yang berbeda-beda oleh pengelolaan BOS di tiap-tiap sekolah.

Di sisi lain masih ada kelemahan dalam pengelolaan atau penggunaan dana BOS, yaitu pelanggaran alokasi penggunaan dana BOS untuk keperluan diluar ketentuan yang ditetapkan pemerintah melalui Juknis (petunjuk teknis) dana BOS tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Misalnya ongkos transportasi yang melebihi ketetapan pemerintah, iuran desa adat, dan hal-hal lain yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.

SD Negeri 1 Bebalang merupakan salah satu sekolah penerima dana BOS dari pemerintah. Pada tahun 2015 pihak sekolah menerima dana BOS sebesar Rp.137.600.000. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba meneliti tentang akuntabilitas pengelolaan dana BOS di SD Negeri 1 Bebalang Bangli serta pihak-pihak yang terlibat dalam mempertanggungjawabkan kepada pemerintah dan masyarakat (komite sekolah dan wali murid) terhadap program yang telah dijalankan.

Dalam implementasinya masih banyak yang tidak memahami tentang siapa saja pihak yang terkait akan penyaluran, penggunaan, dan pelaporan pertanggungjawaban dana BOS tersebut. Pemahaman tentang siapa saja yang terkait dalam Program BOS sangat diperlukan dalam rangka memperjelas tentang batas-batas pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS. Hal ini diperlukan,

terutama apabila timbul permasalahan tentang siapa yang harus bertanggung jawab atas adanya kesalahan dalam pengelolaan dana BOS.

Penelitian yang dilakukan oleh Afida Juwita Sari (2014) yang menunjukkan hasil penelitian bahwa pengelolaan dana BOS SD Jember Lor 3 apabila ditinjau dari akuntabilitas masih belum bisa menyesuaikan jumlah dana yang sekolah rencanakan diawal pembelajaran dengan dana yang sekolah gunakan pada saat periode pembelajaran. Hal ini dikarenakan sekolah belum melakukan taksiran harga dengan cermat dan kurangnya sekolah dalam memaksimalkan peran komite dan wali murid.

Selain itu penelitian dari Jayatri (2012), dengan hasil penelitian pengelolaan dana BOS dan fasilitas terkait dana BOS di kedua sekolah belum berjalan terlalu baik. Ada beberapa kesalahan yang masih dilakukan oleh pengurus sekolah. Akan tetapi, asas akuntabilitas dan transparansi sudah dilaksanakan dengan baik oleh kedua sekolah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana BOS pada SD Negeri 1 Bebalang Bangli?, (2) Siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam akuntabilitas pengelolaan dana BOS yang telah diterima oleh SD Negeri 1 Bebalang Bangli?

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana BOS pada SD Negeri 1 Bebalang Bangli. (2) Siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam akuntabilitas pengelolaan dana BOS yang telah diterima oleh SD Negeri 1 Bebalang Bangli

### **Kajian Pustaka**

Menurut Rasul (2002:8), akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang/sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi. Sedangkan menurut

Sukarsno (2002: 131), akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berwenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

### **Dimensi Akuntabilitas**

Dalam organisasi sektor publik akuntabilitas memiliki beberapa dimensi. Menurut Ellwod (dalam Mardiasmo, 2009:21-23), terdapat empat dimensi akuntabilitas, yaitu:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran
2. Akuntabilitas Proses
3. Akuntabilitas Program
4. Akuntabilitas Kebijakan

### **Indikator Keberhasilan Akuntabilitas**

Menurut Sutedi (2009:398-399), Terdapat beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas, yaitu:

- 1) Pembuatan sebuah keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan.
- 2) Pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar maupun nilai-nilai yang berlaku di *stakeholders*.
- 3) Adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai dengan visi, misi organisasi, serta standar yang berlaku.
- 4) Adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, dengan konsekuensi pertanggungjawaban jika standar tersebut tidak terpenuhi.
- 5) Konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut.

### **Pengelolaan Dana**

Pengelolaan merupakan sebuah istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen secara etimologi pengelolaan berasal dari kata kelola (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani suatu untuk mencapai tujuan. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Ferdiana dan Ansar (2012) mengungkapkan bahwa pengelolaan keuangan mengacu pada prinsip pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif dan akuntabel. Proses pengelolaan menganut prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Tahapan pengelolaan keuangan meliputi: perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pengawasan, pembuatan informasi, penggalangan dana, dan keberlanjutan keuangan.

### **Bantuan Operasional Sekolah**

Menurut Peraturan Mendiknas Nomor 69 Tahun 2009, standar biaya operasi nonpersonalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan. BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

### **Tujuan Bantuan Operasional Sekolah**

Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.

Secara khusus program BOS bertujuan untuk:

1. Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT (Terbuka) negeri terhadap biaya operasi sekolah.

2. Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta.
3. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

### **Metode Penelitian**

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2000:3), metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Pada penelitian deskriptif, data yang dianalisis tidak untuk menerima atau menolak hipotesis melainkan hasil analisis itu berupa deskripsi dari gejala - gejala yang diamati. Jadi penelitian deskriptif merupakan penelitian yang tidak dimaksudkan untuk menguji atau merumuskan hipotesis tertentu, tetapi hanya untuk menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan, dalam hal ini mengenai akuntabilitas pengelolaan dana BOS dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana BOS di SD Negeri 1 Bebalang, Bangli periode tahun 2015.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari sumber data primer yaitu data yang diperoleh dan diolah secara langsung oleh peneliti, yaitu data yang didapatkan langsung dari informan, serta data sekunder yaitu data pendukung yang melengkapi data primer, yang diperoleh dari dokumen-dokumen, tulisan/artikel, laporan hasil penelitian dan buku-buku literatur dari sumber yang berkompeten.

Teknik dan pengumpulan data yang digunakan yaitu : observasi, wawancara, dan pencatatan dokumen. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan model interaktif. Menurut Miles dan Huberman (2007:246) diartikan "Dalam pandangan model interaktif, terdapat tiga jenis kegiatan analisis (reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan) dan pengumpulan

data itu sendiri merupakan proses interaktif.

### **Hasil Dan Pembahasan**

Sekolah Dasar Negeri 1 Bebalang terletak di Jalan Patih Jelantik No. 1 Bebalang, Lingkungan Br. Bebalang, Kelurahan Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Sekolah Dasar Negeri 1 Bebalang berdiri sejak Tahun 1930 dengan Nomor 4Q064504 Surat Keputusan Tanggal 20 Oktober 2000. Sekolah Dasar Negeri 1 Bebalang termasuk dalam kategori sekolah standar, yang mendapatkan nilai akreditasi A. Pada saat ini, Sekolah Dasar Negeri 1 Bebalang dikepalai oleh I Ketut Gunarasa.

Hasil penelitian ini menguraikan deskripsi data tentang akuntabilitas pengelolaan dana BOS yang dikelompokkan menjadi tiga komponen, yaitu: Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan.

### **Perencanaan Dana BOS di SD Negeri 1 Bebalang Bangli**

Perencanaan Pengelolaan Dana BOS di SD Negeri 1 Bebalang Bangli diawali dengan proses penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). yaitu kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan fisik (sarana dan prasarana).

Menurut Kepala Sekolah dan Bendahara BOS SD Negeri 1 Bebalang Bangli proses penyusunan RKAS dilakukan secara terbuka yang dibuat pada tahun ajaran baru. Proses penyusunan RKAS melibatkan guru dan pegawai administrasi yang diawali dengan kegiatan pengumpulan rencana atau usulan kebutuhan sekolah dari semua guru dan pegawai administrasi, kemudian dirapatkan dan disetujui oleh Kepala Sekolah dengan memperhatikan masukan Komite Sekolah.

Penyusunan RKAS melibatkan guru, pegawai dan komite sekolah dibuktikan dengan adanya daftar hadir pada saat rapat penyusunan RKAS. Pengelompokan sumber dana dalam penyusunan RKAS, terdiri dari: dana BOS, dana dari Provinsi, dana dari Kabupaten dan masyarakat. Penjabaran dana BOS dalam RKAS di SD Negeri 1

Bebalang Bangli diterterakan jumlah dana BOS secara keseluruhan dan rinciannya berupa detail item-item yang dibiayai dengan dana BOS yang sudah didasarkan pada petunjuk teknis BOS.

### **Pelaksanaan Dana BOS di SD Negeri 1 Bebalang Bangli**

Menurut Kepala Sekolah dan Bendahara dana BOS, penggunaan dana BOS didasarkan pada rencana anggaran sekolah dan juknis dana BOS, sehingga realisasi dalam penggunaan atau pelaksanaan dana BOS berpatokan pada RKAS. Penggunaan dana BOS hanya untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersifat operasional non-personalia.

Kegiatan operasional yang dibiayai menggunakan dana BOS pada tahun 2015 periode bulan Januari hingga bulan Juni dijabarkan bahwa penggunaan dana BOS di SD Negeri 1 Bebalang Bangli adalah untuk membiayai kegiatan pembelian/pengadaan ujian pematapan, ujian tengah semester, penggantian soal dan penyediaan lembar jawaban, pembelian alat tulis sekolah, pembelian sarana olahraga, pembelian alat dan bahan habis pakai, penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler, biaya pendaftaran lomba siswa, pemeliharaan dan perbaikan sarana/prasarana sekolah, pembayaran daya dan jasa sekolah, penyusunan dan pelaporan pertanggungjawaban, serta pembiayaan pengembangan pendidikan dan tenaga kependidikan.

Kegiatan operasional yang dibiayai menggunakan dana BOS pada periode bulan Juli hingga bulan Desember tidak jauh berbeda dengan periode sebelumnya, namun ada beberapa kegiatan yang berbeda, yaitu: kegiatan pengadaan buku pegangan siswa, pengadaan komputer, pengadaan dokumentasi sekolah, serta penerimaan siswa baru.

Menurut Kepala Sekolah dan Bendahara BOS SD Negeri 1 Bebalang Bangli, pembuatan pembukuan dilakukan dengan dua cara, yaitu tulis tangan dan menggunakan komputer. Pembuatan pembukuan dilakukan oleh Bendahara BOS yang dibantu pegawai administrasi sekolah. Pembukuan yang dilaksanakan

selalu disertai dengan adanya bukti transaksi pengeluaran dana atas pembelian yang dilakukan dan bukti transaksi tersebut dikumpulkan guna untuk pelaporan.

### **Pelaporan Dana BOS di SD Negeri 1 Bebalang Bangli**

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pengelola dana BOS SD Negeri 1 Bebalang Bangli harus membuat laporan pertanggungjawaban. Setiap sekolah yang menerima dana BOS diharuskan untuk membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan pada setiap kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan dana BOS.

Menurut Kepala sekolah dan Bendahara BOS dalam melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS pihak sekolah membuat laporan triwulanan penggunaan dana BOS, kemudian laporan tersebut diserahkan kepada SKPD Kabupaten/Kota sebagai bentuk pertanggungjawaban. Waktu pelaporan pengelolaan dana BOS pada akhir periode dana BOS, setelah akhir periode berakhir harus sudah memberikan laporan kepada pusat melalui sistem *online* pemerintah [www.bos.kemdikbud.go.id](http://www.bos.kemdikbud.go.id). Sedangkan penyampaian informasi pertanggungjawaban dan penerimaan dana BOS kepada wali murid dilakukan pada saat rapat dengan wali murid setiap semester bersamaan dengan pembagian rapor peserta didik. Pihak yang melakukan pembuatan laporan pengelolaan dana BOS adalah Bendahara BOS dan pegawai administrasi yang ditunjuk.

SD Negeri 1 Bebalang Bangli juga melakukan publikasi mengenai pengelolaan dana BOS yang diterima. Menurut Kepala Sekolah dan Bendahara BOS, publikasi yang dilakukan oleh sekolah dilaksanakan dengan menempelkan besaran dana yang diterima dan RKAS yang telah dibuat di papan pengumuman serta mensosialisasikan pertanggungjawaban penggunaan dana pada saat rapat pleno dengan wali murid dengan cara membagikan lembaran rekapitulasi penggunaan dana BOS.

## **Pembahasan**

### **Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS di SD Negeri 1 Bebalang Bangli**

Akuntabilitas dalam penelitian ini merupakan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana BOS yang diterima oleh sekolah sebagai sumber dana yang digunakan untuk menjalankan kegiatan di sekolah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebagai wujud pertanggungjawaban sekolah dalam mengelola dana BOS, maka sekolah terlebih dahulu membuat perencanaan alokasi dana yang akan digunakan dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

Hasil penelitian, menunjukkan penyusunan RKAS BOS di SD Negeri 1 Bebalang sebagian besar dana BOS direncanakan untuk pengembangan sarana dan prasarana sekolah guna kelancaran proses belajar mengajar dengan alokasi yang dianggarkan sebesar 29%. Untuk pembelian/penggunaan buku pelajaran, dan program pengembangan standar proses lainnya pengalokasian yang dianggarkan dalam RKAS adalah sebesar 26% dari total keseluruhan dana BOS yang dikelola oleh sekolah. Sedangkan untuk pengembangan standar pembiayaan pengalokasian dana yang dianggarkan sebesar 28%. Hal ini menginformasikan bahwa prioritas alokasi dana BOS secara umum tertuju untuk pembayaran sarana prasarana dan pengembangan standar pembiayaan sekolah seperti pengadaan meja dan kursi siswa, pengadaan laptop, dan renovasi gedung sekolah.

Penyusunan RKAS didasarkan atas kebutuhan sekolah dan disesuaikan dengan program kerja sekolah. Pelaksanaan rapat penyusunan RKAS dihadiri oleh guru, pegawai administrasi, pengawas dan Komite Sekolah. Semua kegiatan sekolah yang menggunakan dana BOS direncanakan secara menyeluruh dan terdapat rincian anggaran yang telah direncanakan. Tersedianya dana dari Pemerintah Pusat berupa dana BOS telah membantu sekolah dalam

pengelolaan kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan operasional sekolah.

Dalam pelaksanaan penggunaan dana BOS pada SD Negeri 1 Bebalang tidak terdapat hal-hal yang secara frontal melanggar ketentuan yang ditetapkan pemerintah melalui juknis dana BOS tahun 2015, akan tetapi ada beberapa kegiatan yang tidak secara langsung terkait dengan kepentingan para siswa yang dibiayai dengan menggunakan dana BOS. Seperti misal biaya transportasi guru untuk mengantar surat undangan atau menghadiri undangan suatu instansi tertentu dan iuran pura desa adat. Alasan pihak sekolah tetap mendanai kegiatan tersebut dengan dana BOS dikarenakan dalam aturan yang ada hal tersebut tidak dilarang secara tegas dan pihak sekolah berpendapat bahwa hal tersebut diperbolehkan.

Petunjuk teknis BOS tahun 2015, menjelaskan pembukuan yang harus dibuat oleh sekolah dalam pengelolaan dana BOS berupa buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank, dan buku pembantu pajak. Pelaksanaan pengelolaan dana BOS melakukan pembukuan dana BOS dimaksudkan untuk merekap penggunaan dana dan penerimaan yang terjadi oleh sekolah. Selain itu, agar memudahkan saat ada pemeriksaan oleh tim audit/pemeriksa laporan.

Pembuatan pembukuan di SD Negeri 1 Bebalang Bangli secara umum telah melakukan pembukuan dengan baik, dan format-format BOS sudah dikerjakan dengan lengkap baik dalam bentuk tulisan tangan maupun berupa ketikan. Secara keseluruhan kelengkapan surat pertanggungjawaban (SPJ) sudah baik, dan transaksi yang dilakukan mempunyai bukti pendukung. Pembukuan yang dibuat adalah buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank dan buku pembantu pajak. Pelaksanaan pembukuan dibuat oleh Bendahara BOS, pencatatan dalam pembukuan dilakukan setiap terjadi transaksi. Setiap terjadi transaksi Tim belanja barang wajib meminta bukti transaksi dan diberikan kepada Bendahara BOS, yang mana akan dijadikan sebagai kelengkapan dalam pelaksanaan pembukuan.

Dalam pembuatan LPJ pihak sekolah sudah memiliki bukti transaksi yang jelas, dan pada saat melakukan transaksi pihak sekolah tidak lupa memberikan penomoran akun, bukti transaksi juga diurutkan sesuai dengan kejadian dan ada nomor kwitansinya, tanggal transaksi juga jelas, dan tidak di temukan nota maupun kwintasi kosong dalam lampiran SPJ.

Analisis hasil pelaporan BOS di SD Negeri 1 Bebalang Bangli, sekolah telah membuat laporan sesuai dengan petunjuk teknis BOS. Sekolah melakukan pelaporan pertanggungjawaban kepada dinas terkait, yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten dan Pemerintah Pusat. Pelaporan yang dilakukan oleh sekolah kepada Dinas Pendidikan Kabupaten dilengkapi dengan laporan lengkap pengelolaan dana BOS. Laporan lengkap BOS terdiri dari narasi laporan terkait jumlah siswa, jumlah dana yang diterima, penggunaan dana, pembukuan yang terdiri dari buku kas umum, pembantu kas, buku pembantu bank, dan buku pembantu pajak, bukti transaksi, SSP (Surat Setoran Pajak) terhadap penggunaan dana selama kegiatan, serta foto dokumentasi kegiatan sekolah dalam penggunaan dana. Kemudian untuk pemerintah pusat berupa laporan ringkas triwulanan penggunaan dana BOS, yang diunggah pada situs website BOS Kemdikbud.

Selain kepada Dinas terkait, sekolah juga dituntut untuk melaporkan pengelolaan dana BOS kepada warga sekolah. Pelaporan kepada warga sekolah dilakukan pada saat rapat pleno, sekolah menginformasikan penggunaan dana BOS kepada guru, Komite Sekolah, dan wali murid SD Negeri 1 Bebalang Bangli.

SD Negeri 1 Bebalang Bangli juga telah melakukan publikasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS dengan dua cara yaitu, pertama pihak sekolah menempel rincian besar dana yang diterima sekolah dan rencana penggunaan dana BOS yang berupa RKAS di papan pengumuman sekolah, dan yang ke dua melakukan sosialisasi dengan cara memberikan lembar kertas kepada wali murid yang berisi rekapitulasi penggunaan dana BOS yang telah

digunakan oleh sekolah pada saat rapat pleno.

Dari uraian yang telah dijabarkan diatas dapat kita ketahui bahwa akuntabilitas pengelolaan dana BOS di SD Negeri 1 Bebalang Bangli sudah baik atau akuntabel, hal ini dikarenakan SD Negeri 1 Bebalang Bangli dalam mengelola dana dan membuat laporan pertanggungjawaban dilakukan dengan terbuka dan melibatkan banyak pihak, serta sudah sesuai dengan Juknis dana BOS tahun anggaran 2015.

### **Pihak-pihak yang Terlibat dalam Pengelolaan Dana BOS**

SD Negeri 1 Bebalang Bangli merupakan salah satu sekolah dasar yang menerima dana BOS, untuk memenuhi program kegiatan yang dijalankan dana yang diterima harus dikelola dengan baik dan transparan. Dalam mengelola dana BOS yang diterima pihak sekolah perlu membentuk tim manajemen BOS sekolah dan melibatkan warga sekolah dalam mengelola dana tersebut.

Menurut Kepala Sekolah dalam mengelola dana BOS yang diterima oleh SD Negeri 1 Bebalang Bangli, pihak sekolah membentuk tim manajemen BOS sekolah, yang terdiri dari Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab, Bendahara dana BOS dan Komite Sekolah sebagai anggota. Untuk penyusunan RKAS melibatkan Kepala Sekolah, Bendahara, Guru, Pegawai Administrasi, Pengawas dan Komite Sekolah hal ini dibuktikan dengan daftar hadir rapat penyusunan RKAS tahun 2015. Sedangkan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS dibuat oleh bendahara dana BOS yang dibantu oleh pegawai administrasi dengan sepengetahuan Kepala Sekolah dan Komite Sekolah.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan dana BOS melibatkan Kepala Sekolah, bendahara, guru, pegawai administrasi, pengawas dan Komite Sekolah sebagai perwakilan dari wali murid sehingga pengelolaan dana BOS berjalan dengan baik. Selain itu dengan dilibatkannya seluruh pegawai sekolah dan komite sekolah dapat mengurangi kecurigaan

antar pihak pengelola dana, pegawai sekolah dan wali murid.

### Simpulan Dan Saran

Dari pembahasan yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas untuk pengelolaan dana BOS di SD Negeri 1 Bebalang Bangli berjalan dengan baik atau akuntabel. Hal ini dikarenakan SD Negeri 1 Bebalang Bangli dalam mengelola dana dan membuat laporan pertanggungjawaban dilakukan dengan terbuka dan melibatkan banyak pihak, serta sudah sesuai dengan Juknis dana BOS tahun anggaran 2015.

Proses pengelolaan dana BOS pada SD Negeri 1 Bebalang Bangli melibatkan Kepala Sekolah, Bendahara, guru, pegawai administrasi sekolah, pengawas dan Komite Sekolah sebagai perwakilan dari wali murid sehingga pengelolaan dana BOS berjalan dengan baik. Dengan dilibatkannya seluruh pegawai sekolah dan komite sekolah dapat mengurangi kecurigaan antar pihak pengelola dana, pegawai sekolah dan wali murid.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang dilakukan peneliti, maka peneliti mengemukakan saran agar pihak sekolah dapat memanfaatkan peningkatan kualitas dan kuantitas mutu pendidikan dari adanya dana BOS, serta dalam memberikan informasi mengenai penggunaan dana BOS kepada pemangku kepentingan tidak hanya menggunakan papan pengumuman, sekolah diharapkan dapat memanfaatkan media sosial yang ada guna penyampaian informasi mengenai pertanggungjawaban penggunaan dana BOS yang diterima.

### Daftar Pustaka

Ferdiana dan Ansar.2012. Akuntabilitas Lsm, Milik Donor Atau Publik (Studi Analisis Wacana Studi Pada Kantor Eksekutif Daerah Walhi Sulawesi Tengah). Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako Palu.

Jayatri, Monika. 2012. “ Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 11 Yogyakarta dan SMPN 1 Purworejo. Fakultas Ekonomi Program Studi Ekstensi Universitas Indonesia Jakarta.

Juwita, Afida Sari. 2014. “Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Ditinjau Dari Akuntabilitas. (Studi Kasus pada SD Jember Lor 3 tahun Anggaran 2012)”. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Miles, Manthaw B dan A. Michael Huberman. 2007. Terjemahan Tjejep Rohendi. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.

Meoleong, Lexy J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Peraturan Mendiknas Nomor 69 tahun 2009 tentang *standar biaya operasi non personalia*.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang *Pendanaan Pendidikan*

Rasul, Syahrudin. 2002. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU No. 17/2003 Tentang Keuangan Negara*. Jakarta: PNRI

Simanjutak, Dahnil Anzar dan Yeni Januarsi. 2011. Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan di Masjid. Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh. Makalah disampaikan pada 21-22 Juli 2011, Banda Aceh.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.